



PENGARUH UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PADA TAHUN 2023

Risca Wijayanti^{1*}, Sarah Adelia², Seina Aprilia³

^{1,2,3}Universitas Pamulang, Indonesia

Email: riscawijayanti2@gmail.com | saraliaaa02@gmail.com | seinaaprilia29@gmail.com

Abstract

The development of Islamic economics with the application of sharia principles in economic activities is starting to be practiced in the field of sharia finance. This started with the establishment of sharia banking, then followed by the emergence of the sharia capital market as an investment tool to attract profits and seek capital. The Jakarta Islamic Index (JII) as the antithesis of the conventional capital market has challenges when carrying out investments using sharia principles, this is because securities in the form of shares are greatly influenced by macroeconomic aspects such as interest rates. So sharia share prices are very sensitive to the dynamics of interest rates. This research seeks to see the extent of the influence of interest rates on sharia share prices at JII. The method used is VECM analysis to see long-term effects. The results of this research found that the interest rate variable did not significantly influence sharia stock prices in the long term, however the results of the VECM analysis found that there was a negative relationship, meaning that there was still an influence, although not significant. So sharia share prices can still be affected by changes in conventional interest rates.

Keywords: *Cointegration, Interest Rates, Sharia Shares*

Abstrak

Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama, terutama melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran, khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang. Dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, yaitu sebesar 61% atau setara Rp9.580 triliun, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain itu, UMKM mampu bertahan dalam situasi ekonomi global yang tidak stabil melalui fleksibilitas dan inovasi produk. Dukungan pemerintah, seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi faktor penting dalam pemberdayaan UMKM, meskipun realisasinya pada tahun 2023 belum mencapai target. Tren positif pertumbuhan UMKM, yang mencakup 99% unit usaha di Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja, menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional serta mengevaluasi strategi pengembangan yang dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: UMKM, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memengaruhi masa depan mereka dan meningkatkan taraf hidup. Di era globalisasi, pembangunan sering kali berfokus pada sektor ekonomi sebagai indikator keberhasilan. Namun, pembangunan yang hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dan keseimbangan aspek sosial, politik, serta ekonomi, akan menjadi rapuh. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dilibatkan sebagai aktor utama sekaligus penerima manfaat pembangunan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM menjadi penyokong utama perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia maupun negara maju. Di Indonesia, UMKM membantu memulihkan ekonomi pascakrisis moneter, menjadi alternatif sumber pekerjaan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. UMKM juga berkontribusi besar terhadap

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Pemerintah mendukung UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun penyalurannya tahun 2023 belum memenuhi target. UMKM kini terus bertumbuh dan berkontribusi signifikan, dengan menyumbang 61% terhadap PDB nasional atau setara Rp9.580 triliun, menyerap 97% tenaga kerja, dan menghimpun 60,4% total investasi. Fleksibilitas dan kemampuan UMKM untuk berinovasi membuatnya tetap bertahan dalam kondisi ekonomi global yang sulit, menjadikannya sektor potensial untuk terus dikembangkan demi memperkuat perekonomian Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Usaha Mikro Kecil Menengah

Berikut adalah pengertian UMKM menurut beberapa ahli:

1. Menurut Adi M. Kwartono, UMKM merupakan kegiatan ekonomi dengan kekayaan tidak lebih dari Rp200 juta bersih, terlepas dari aset tanah serta bangunan untuk usaha. UMKM didefinisikan sebagai usaha yang dikendalikan warga negara dengan pendapatan tahunan tidak lebih dari Rp1 miliar (Ariyanto et al., 2021).
2. Menurut Ina Primiana, UMKM merupakan upaya percepatan pemulihan ekonomi melalui program program prioritas dan pengembangan berbagai sektor serta potensi daerah. UMKM dianggap menjadi pengembangan kawasan andalan bagi pemerintah (Turmundi, 2017).
3. Menurut Rudjito, UMKM merupakan usaha yang bisa membantu ekonomi Indonesia, yang diperkuat oleh fakta proporsi PDB UMKM (Zia, 2020).
4. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Aufar (2014:8), UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, yaitu entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Sementara itu, usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp200.000.000 hingga Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang dari perusahaan lain, dengan kriteria modal usaha yang memiliki tolak ukur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Hukum UMKM

Pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang mendefinisikan tiga jenis usaha, yaitu:

1. Usaha Mikro: usaha yang memiliki aset bersih paling banyak Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Usaha ini dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha.

2. Usaha Kecil: usaha dengan aset bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000.
3. Usaha Menengah: usaha dengan aset bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000.

Klasifikasi UMKM

Menurut Tambunan (2013), UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Livelihood activities: UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, dikenal sebagai sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. Micro enterprise: UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki jiwa kewirausahaan.
3. Small dynamic enterprise: UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima sekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Fast moving enterprise: UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Pemberdayaan UMKM

Di Indonesia, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM diatur sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar.
3. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
4. Peningkatan daya saing UMKM.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Kelima hal tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, pencipta lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pengembangan UMKM

Menurut Kartasasmita (1996), unsur-unsur pengembangan UMKM mencakup perolehan aset produksi khususnya modal, teknologi, manajemen, akses pasar, pengumpulan informasi pasar, dukungan produksi, dan saran pemasaran serta infrastruktur.

Menurut Donald L. Kirkpatrick dalam Adam I. Indra Wijaya (2000), pengembangan usaha

berarti suatu proses yang bertahap dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan prestasi kerja para manajer dalam upaya peningkatan kinerja dan pertumbuhan organisasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat UMKM

Pengembangan UMKM mendapat dukungan dari berbagai aspek, seperti program pendampingan dari unit kerja pemerintah maupun lembaga mitra yang memberikan pengetahuan dan pengalaman melalui pelatihan, pembekalan, pembinaan, serta monitoring kepada para pelaku UMKM.

Menurut Aisyah (2015:26), faktor penghambat UMKM meliputi masalah permodalan, kurangnya bahan baku berkualitas, dan sarana prasarana pemasaran. Para pemilik usaha UMKM mengaku pemasaran masih dilakukan sebatas kemampuan mereka. Pihak pemerintah mengaku sudah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku UMKM untuk pengembangan industri kreatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional. Data yang digunakan mencakup data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti laporan Kementerian Koperasi dan UKM, publikasi statistik, dan literatur akademik terkait.

Pengumpulan Data

1. Menghimpun data statistik tentang kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Mengidentifikasi tren pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun.

Analisis Data

1. Menganalisis kontribusi UMKM terhadap indikator ekonomi utama seperti PDB, investasi, dan lapangan kerja.
2. Mengevaluasi efektivitas program pemerintah, terutama penyaluran KUR, dalam mendukung perkembangan UMKM.

Interpretasi Hasil

1. Membandingkan hasil analisis dengan temuan penelitian sebelumnya di negara berkembang dan maju untuk melihat relevansi dan potensi pengembangan UMKM.
2. Menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam memperkuat perekonomian nasional.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan

pelaku UMKM dalam mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi, yang dipengaruhi oleh teknologi, institusi, dan ideologi (Oliver, 2019). Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi hasil produksi yang memberikan manfaat seperti peningkatan lapangan kerja, pendapatan per kapita, dan peluang investasi, meskipun menghadapi tantangan seperti distribusi kekayaan yang adil, dampak lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial (Khabibi, 2020).

Menurut Sukirno (2007), pertumbuhan ekonomi melibatkan peningkatan output riil atau pendapatan nasional riil secara berkelanjutan, dengan fokus pada output per kapita dalam jangka panjang sebagai indikator kemajuan ekonomi. Hal ini mencakup proses yang berkelanjutan, bukan hanya hasil pada suatu waktu tertentu.

Dornbusch et al. dalam Hasyim (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan riil produk domestik bruto (PDB), yang mencerminkan kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ini dapat bersifat ekstensif (melibatkan lebih banyak sumber daya) atau intensif (menggunakan sumber daya secara efisien).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Harrod Domar

Teori pertumbuhan Harrod Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang.

Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, intermediasi perbankan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan pinjaman modal dari lembaga perbankan dapat meningkatkan kapasitas produksi UMKM secara langsung.

Teori David Ricardo

Teori Ricardo pertama kali dikemukakan dalam karyanya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Menurut David Ricardo, akumulasi produktivitas tenaga kerja dapat memperlambat berlakunya hukum hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), yang pada akhirnya akan memperlambat penurunan tingkat hidup minimal masyarakat.

Peranan UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sadono Sukirno (2008) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pembangunan ekonomi berbasis UMKM menjadi industri kreatif dengan ide-ide inovatif yang berkontribusi terhadap pembangunan produk dan jasa. Menurut Howkins (2011:71), ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

UMKM mempunyai peran yang sangat relevan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (Rambe et al., 2023). Terdapat beberapa peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat:

1. Penyerapan tenaga kerja: UMKM merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pada tahun 2023, UMKM memperoleh 95% dari tenaga kerja di Indonesia.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat: UMKM yang berkembang akan memberikan penghasilan kepada pemilik usaha dan karyawannya sehingga daya beli masyarakat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Penciptaan lapangan usaha baru: UMKM membutuhkan tenaga kerja baru untuk membantu operasional usahanya, sehingga memberi kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Peningkatan pemerataan ekonomi: UMKM yang tersebar di pelosok Indonesia akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
5. Pelestarian budaya dan kearifan lokal: UMKM yang memproduksi barang atau jasa tradisional membantu menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan budaya Indonesia.

Dampak UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi

UMKM adalah bisnis mandiri dengan modal kecil yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. UMKM sering kali dijalankan oleh individu atau perusahaan kecil dengan fleksibilitas tinggi dan tantangan seperti kurangnya inovasi SDM, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya izin usaha atau dokumen hukum.

Meskipun demikian, UMKM memberikan banyak manfaat, termasuk menjadi sumber produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menawarkan solusi ekonomi bagi masyarakat menengah. Dengan kontribusinya yang signifikan, UMKM membantu menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan UMKM dalam Proses Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mereka menghadapi beberapa tantangan yang membatasi kemampuan mereka untuk mencapai potensi

penuh (Zaelani, 2019). Tantangan-tantangan tersebut meliputi:

1. Akses keuangan terbatas: Akses ke keuangan sangat penting bagi UMKM untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka, karena mereka sering kali kekurangan agunan dan dapat dianggap sebagai peminjam berisiko tinggi oleh pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
2. Kurangnya akses teknologi modern: Hal ini dapat mempengaruhi daya saing dan produktivitas UMKM (Santoso et al., 2020). Banyak UMKM tidak dapat mengakses atau membeli teknologi baru, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk berinovasi dan bersaing di pasar. Masalah ini khususnya terjadi di daerah berpenghasilan rendah (Rizos et al., 2016).
3. Keterampilan manajerial dan kewirausahaan yang terbatas.
4. Infrastruktur yang tidak memadai.
5. Lingkungan peraturan yang tidak menguntungkan.

Tantangan-tantangan ini secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengatasi tantangan tersebut sangat penting bagi pembuat kebijakan, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM dalam berkontribusi secara efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial (Akpoviroro & Owotutu, 2018; Roxas & Chande, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan barang dan jasa kepada penduduknya. Ini mencakup peningkatan output riil, pendapatan nasional, dan pendapatan per kapita secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, perubahan institusional, dan adaptasi ideologis terhadap kondisi yang ada. Pertumbuhan ini juga memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan lapangan kerja dan peluang untuk investasi yang lebih besar. Meskipun membawa manfaat, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal distribusi kekayaan yang adil, dampak lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada angka, melainkan juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dari kemajuan suatu negara, namun juga harus diimbangi dengan perhatian terhadap distribusi pendapatan dan dampak sosial serta lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, Z., & Maryanto. (2020). Pengaruh Persepsi Atas Tujuan Laporan Keuangan Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Di Kota Sungai Penuh Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi Sakti*, 9(2).

- Azzahra, B., & Wibawa, I. A. R. P. (2021). Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045. *Jurnal Analisis Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(1).
- Azzahra, N. (2022). *Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Dharma, B., Hasibuan, R., & Wiranti. (2022). Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 2(3).
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6).
- Jamiat, N. (2020). *Pemanfaatan Digital Marketing Pada UMKM Sukapura Dayeuhkolot Kabupaten Bandung*. *Jurnal Administrasi*, 6(1).
- Lubis, P. I. S., & Rofila, S. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(3).
- Saefulloh, M. M., Fahlevi, M. R., & Centauri, A. S. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Sarfiah, N. S., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(2).
- Sirait, E., Sugiharto, B. H., Abidin, J., Padang, N., & Putra, J. E. (2024). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(7).
- Tesalonica, E. L., Lengkong, F., & Mambo, R. (2023). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(9).
- Utna, I. S., & Saputra, A. (2020). Analisis Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam. *Seminar Ilmu Sosial Dan Teknologi*, 3(25).
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3).
- Yuniarti, Wianti, W., & Estri, N. N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3).